

PENGARUH PENERAPAN KONVERGENSI IFRS TERHADAP PENILAIAN ASET DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP FAIR VALUE

Yanuarita Rohmatul Laili

yanuaritalaili@gmail.com

Universitas Negeri Surabaya

Abstract

International Financial Reporting Standar (IFRS) is a guidelines for financial statements which is the guidelines is a globally accepted, where as Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) is a Indonesia's guidelines. PSAK is accounting standards in Indonesia. Indonesia as part of the growth of the world economy has adjusted by means of convergence to IFRS. With the convergence to IFRS, it will give affect to tte inventory valuation. At first, inventory valuation using historical cost then using fair value concept. Fair value concept measure the inventory based on current cost.

Keywords : Konvergensi, IFRS, Historical Cost, Fair Value

PENDAHULUAN

Isu yang banyak diperbincangkan di lingkungan bisnis terutama dalam kalangan akuntan saat ini adalah mengenai adanya konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menuju *International Financial Reporting Standard* (IFRS). PSAK adalah salah satu standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia selain SAK ETAP, SAK Syariah dan Standar Akuntansi Pemerintahan. PSAK ini digunakan sebagai pedoman para akuntan untuk membuat laporan keuangan perusahaan.

International Financial Reporting Standar (IFRS) merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan yang diterima secara global dan mendunia, sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman standar

akuntan di Indonesia untuk membuat laporan keuangan. Indonesia sebagai sebuah negara berkembang yang menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi dunia telah merespon perubahan-perubahan sistem pelaporan keuangan terkini dengan melakukan konvergensi IFRS. Pada Desember 2008, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mencanangkan konvergensi PSAK ke IFRS secara penuh pada tahun 2012 (*full adoption*). *International Financial Reporting Standards* (IFRS) merupakan kesepakatan global mengenai standar akuntansi yang didukung oleh banyak negara dan badan-badan internasional di dunia. Konvergensi PSAK menuju IFRS juga tidak lepas dari keikutsertaan Indonesia dalam forum G-20. Dalam kesepakatan G-20 di Pittsburg pada tanggal 24-25 September 2009, menyatakan bahwa otoritas yang mengawasi aturan akuntansi internasional harus meningkatkan standar global untuk mengurangi kesenjangan aturan di antara negara-negara anggota G-20. Kesepakatan telah diputuskan pada pertemuan yang diadakan oleh forum G-20 di London, 2 April 2009. Pertemuan tersebut menghasilkan 29 kesepakatan, kesepakatan tersebut mengharuskan negara anggota untuk meningkatkan penggunaan nilai wajar (Wirahardja, 2010 dalam Intan, 2012). Indonesia sebagai anggota forum G-20 harus mengikuti kesepakatan tersebut, sehingga pembuatan Standar Akuntansi Keuangan pun mengarah pada konvergensi IFRS yang dahulunya *International Accounting Standar* (IAS). Adopsi penuh IFRS berarti ada perubahan pengukuran dan pengakuan terhadap pelaporan keuangan.

IFRS sebagai *accounting standard* di Indonesia sangat memberikan manfaat, diantaranya: (1) peningkatan daya banding laporan keuangan dan memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional; (2) menghilangkan hambatan

arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan; (3) mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis; (4) meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju “*best practice*”. Dengan diadopsinya IFRS secara penuh, maka laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PSAK tidak lagi memerlukan rekonsiliasi yang signifikan dengan laporan keuangan perusahaan atau entitas yang berasal dari negara lain. Namun, penerapan IFRS berarti merubah dan menyesuaikan sebagian besar prinsip dari standar akuntansi yang sebelumnya telah berlaku. Salah satu perubahan mendasar dari adanya adopsi IFRS tersebut adalah penggunaan *fair value accounting* dalam penilaian persediaan.

Dengan adanya konvergensi ini juga akan memberikan pengaruh terhadap penilaian, pengukuran dan pelaporan laporan keuangan. Contohnya adalah penilaian aset suatu entitas. Sebelum digunakannya atau diterapkannya konsep penggunaan *fair value*, sistem akuntansi untuk penilaian aset menggunakan konsep *historical cost*. Konsep *historical cost* tersebut menggunakan pendekatan biaya perolehan menghasilkan nilai buku. Untuk berbagai kepentingan, laporan nilai buku itulah yang selama ini lazim dijadikan acuan untuk menilai sebuah perusahaan. Dengan kondisi pasar yang semakin dinamis dan berkembang sangat cepat, pada akhirnya konsep *historical cost* dianggap tidak lagi relevan dalam mengukur realitas atau kondisi ekonomi di suatu perusahaan atau entitas. Hal tersebut terjadi karena *historical cost* hanya mengukur transaksi yang telah selesai, tidak bisa mengakui perubahan nilai riil yang terjadi.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai gambaran proses konvergensi PSAK ke IFRS dan juga pengaruh konvergensi IFRS terhadap penggunaan konsep *fair value* dan pengaruhnya terhadap penilaian aset, sehingga judul yang digunakan adalah rumusan permasalahan dalam jurnal ini adalah **“PENGARUH PENERAPAN KONVERGENSI IFRS TERHADAP PENILAIAN ASET DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP FAIR VALUE”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses konvergensi PSAK ke IFRS di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh konvergensi IFRS terhadap penggunaan konsep *Fair Value* terhadap penilaian suatu *aset*?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui proses konvergensi PSAK ke IFRS di Indonesia, dan untuk mengetahui pengaruh konvergensi IFRS terhadap penggunaan konsep *fair value* terhadap penilaian aset di suatu entitas.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian dengan cara menguraikan data yang diperoleh untuk dijabarkan berdasarkan keterangan yang didukung teori sehingga pembaca mengetahui gambaran umum mengenai proses konvergensi IFRS yang dilakukan di Indonesia dan pengaruh konvergensi tersebut yaitu penggunaan konsep *fair value* dalam penilaian persediaan.

Teknik Analisis

Teknik yang digunakan dalam jurnal ini dengan cara mengumpulkan informasi dari studi pustaka yang berhubungan dengan konsep IFRS dan juga konsep pengukuran asset yaitu konsep *historical cost* dan juga konsep *fair value*. Studi pustaka atau sumber kepustakaan untuk jurnal ini diperoleh dari jurnal lainnya dan juga sumber lainnya yang sesuai dan relevan dengan konsep IFRS dan juga konsep pengukuran asset.

KAJIAN PUSTAKA

International Financial Reporting Standard (IFRS)

International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan standar yang dibuat oleh *International Accounting Standards Boards (IASB)* yang memiliki tujuan yaitu, untuk memberikan keseragaman standar penyusunan laporan keuangan perusahaan di seluruh dunia. Perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi, dapat diperbandingkan dan transparan yang digunakan oleh investor di pasar modal baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri maupun pihak-pihak yang berkepentingan ataupun *stakeholder* lainnya. Pengembangan IFRS sendiri mendapatkan prioritas oleh *International Organization*

of Securities Commissions (IOSCO). IOSCO sendiri merupakan pemangku kepentingan IFRS yang ikut serta memberikan kontribusi aktif dalam proses penyusunan standar dan penilaian kualitas dari IFRS. IOSCO memperkuat integritas pasar modal international dengan cara mempromosikan standar akuntansi berkualitas tinggi, termasuk penerapan standar yang cermat dan hati-hati dan penegakan hukum. IFRS sendiri merupakan kelanjutan dari *International Accounting Standards* (IAS) yang sudah ada sejak tahun 1973 dan digunakan secara luas oleh negara-negara di Eropa, Inggris dan negara-negara persemaikmuran Inggris. IAS disusun oleh *International Accounting Standards Committee* (IASC). IASC berperan untuk mendorong badan-badan standar akuntansi lokal untuk melakukan harmonisasi standar akuntansi lokal dengan standar akuntansi, peraturan dan prosedur yang berlaku secara internasional. Dalam tahun-tahun awal, IASC memfokuskan kepada penerapan standar akuntansi dan pada tahun-tahun berikutnya meningkatkan standar akuntansi, meminimumkan pilihan-pilihan dari pemakaian standar-standar akuntansi untuk meningkatkan laporan keuangan agar dapat diperbandingkan. Selama akhir periode, IASC bekerja sama dengan dengan IOSCO untuk memperbaiki dan menerapkan standar akuntansi di pasar modal yang terintegrasi. Selama IASC berdiri, sudah 41 standar akuntansi internasional yang diterbitkan. Pada tahun 2001 IOSCO digantikan oleh IASB (*International Accounting Standard Board*).

IASB mengadopsi sebanyak tiga puluh point dari standart akuntansi yang telah dihasilkan oleh IAS untuk menjadi standar akuntansi IFRS. Sampai dengan saat ini sudah dikeluarkan 8 standar akuntansi baru oleh IASB. IFRS sendiri baru mulai diberlakukan mulai tahun 2005, terutama untuk negara-negara yang tergabung dalam

Uni Eropa dan selama empat tahun ke depan (2009) direncanakan semua negara di dunia akan menerapkan atau melakukan konvergensi IFRS ke standar-standar mereka.

Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi, yaitu (1) definisi elemen laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan. Definisi digunakan dalam standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus dicatat dan dikelompokkan ke dalam aset, liabilitas, modal, pendapatan dan biaya. (2) pengukuran dan penilaian elemen laporan keuangan. Pedoman ini digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan pada tanggal neraca di akhir periode akuntansi. (3) pengakuan, yaitu kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan. (4) penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Komponen keempat ini digunakan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Suatu informasi dapat disajikan dalam badan laporan (Neraca, Laporan Laba/Rugi) atau berupa penjelasan yang menyertai laporan keuangan.

IFRS sebagai standar akuntansi di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat, diantaranya: (1) peningkatan daya banding laporan keuangan dan memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional; (2) menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan; (3) mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi

perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis; (4) Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju “*best practice*”.

Pengertian dan Konsep Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas (SAK ETAP, 2009:6). Pengertian aset menurut SAK ETAP ini selaras dengan pengertian aset menurut IFRS. Karakteristik yang melekat pada akun aset dalam laporan keuangan ini membedakan akun aset dengan akun lain yang muncul dalam laporan keuangan. (Kieso, 2010:181) karakteristik aset adalah (1)aset merupakan hasil dari transaksi ekonomi entitas yang dilakukan di masa lalu, (2)aset merupakan sumber daya yang sepenuhnya berada dalam kekuasaan kendali manajemen entitas dan (3)aset digunakan oleh entitas untuk melaksanakan kegiatan operasional bisnis entitas untuk bisa menghasilkan pendapatan atau manfaat bagi entitas di masa mendatang. Secara garis besar, aset diklasifikasikan sebagai aset lancar (*current assets*) dan aset tidak lancar (*non current assets*) (PSAK No.1, 2009:18). Jika dilakukan pengklasifikasian dengan lebih rinci, maka aset terbagi dalam klasifikasi, yaitu: aset tetap, properti investasi, aset tidak berwujud, aset keuangan, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, persediaan, piutang dagang dan piutang lainnya, kas dan setara kas.

Aset merupakan sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit. Aset biasanya dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu (1)aset lancar (*current asset*) adalah aset yang berupa kas dan aset lainnya yang diharapkan akan

dapat diubah menjadi kas, atau dikonsumsi dalam satu tahun atau dalam satu siklus operasi (Kieso, 2010:181). Akun turunan dari aset lancar yang kedua adalah akun investasi jangka panjang. Akun ini merupakan akun tempat di mana entitas bisa menampilkan beragam bentuk investasi entitas yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai investasi jangka pendek. Contoh aset lancar antara lain adalah kas, piutang, investasi jangka pendek, persediaan, dan beban dibayar di muka. Pada suatu neraca, aset biasanya dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar disebut sebagai rasio lancar. Nilai ini sering digunakan sebagai tolok ukur likuiditas suatu perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

(2) Aset tetap (*non current assets*), adalah aset berwujud yang memiliki umur lebih dari satu tahun dan tidak mudah diubah menjadi kas. Jenis aset tidak lancar ini biasanya dibeli untuk digunakan untuk operasi dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Contoh aset tetap antara lain adalah properti, bangunan, pabrik, alat-alat produksi, mesin, kendaraan bermotor, furnitur, perlengkapan kantor, komputer, dan lain-lain. (3) Aset tidak berwujud (*intangible asset*), merupakan jenis aset yang tidak memiliki wujud fisik. Contoh dari aset tidak berwujud (*intangible asset*) adalah hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan *goodwill*. Aset jenis ini mempunyai umur lebih dari satu tahun (aset tidak lancar) dan dapat diamortisasi selama periode pemanfaatannya, yang biasanya tidak lebih dari 40 tahun. Jenis pembagian aset yang terakhir adalah (4) Aset lain. Secara umum, akun ini terdiri dari aset entitas yang tidak dapat dimasukkan dalam keempat klasifikasi aset yang sebelumnya.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 paragraf 5 menyebutkan bahwa: “Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun”. (Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat, Jakarta, 2004, No 16 Paragraf 5)

Prinsip *Historical Cost* dan *Fair Value*

Pengukuran dan penilaian persediaan umumnya dilakukan dengan menggunakan metode *historical cost* dan *fair value*. (1)*historical cost* yaitu asumsi adanya *stable monetary unit* yang mengakibatkan semua transaksi yang terjadi dicatat atas dasar nilai historis atau nilai yang didapat saat terjadi transaksi. Penggunaan *historical cost* dalam akuntansi finansial disebabkan karena beberapa alasan, yaitu Relevan dalam pembuatan keputusan ekonomi bagi manajer dalam membuat keputusan masa depan diperlukan data transaksi masa lalu, *historical cost* lebih mudah untuk dilakukan audit, dan telah disepakatinya penggunaan prinsip *historical cost*. Menurut Suwardjono (2008;475) *historical cost* merupakan rupiah kesepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan. Prinsip *historical cost* menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, modal dan biaya. Yang dimaksud dengan harga perolehan adalah harga pertukaran yang disetujui oleh kedua belah pihak yang tersangkut dalam transaksi. Harga perolehan ini harus terjadi pada seluruh transaksi diantara kedua belah pihak yang

bebas. Harga pertukaran ini dapat terjadi pada seluruh transaksi dengan pihak eksternal, baik yang menyangkut aktiva, hutang, modal dan transaksi lainnya

(2) Fair value. menurut Suwardjono (2008;475) adalah jumlah rupiah yang disepakati untuk suatu obyek dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa tekanan atau keterpaksaan. Nilai wajar (*fair value*) adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aktiva atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham (*knowledgeable*) dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*). Sedangkan pengertian-pengertian yang populer adalah sebagai berikut:

“Fair value is defined in terms of a price agreed by a willing buyer and a willing seller in an arm's length transaction. (IAS).

“The fair value of an asset is the amount at which that asset could be bought or sold in a current transaction between willing parties, other than in a liquidation. On the other side of the balance sheet, the fair value of a liability is the amount at which that liability could be incurred or settled in a current transaction between willing parties, other than in a liquidation. If available, a quoted market price in an active market is the best evidence of fair value and should be used as the basis for the measurement. If a quoted market price is not available, preparers should make an estimate of fair value using the best information available in the circumstances. In many circumstances, quoted market prices are unavailable. As a result, difficulties occur when making estimates of fair value”. (GAAP).

Menurut IAI dalam Yolinda, 2010 dasar dari definisi *fair value* adalah asumsi bahwa entitas atau sebuah perusahaan merupakan unit yang akan beroperasi selamanya tanpa adanya keinginan untuk melikuidasi, untuk membatasi secara material skala operasinya atau transaksi dengan persyaratan yang merugikan. Dengan demikian, *fair value* bukanlah nilai yang akan diterima atau dibayarkan entitas dalam suatu transaksi yang dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan, atau penjualan akibat kesulitan keuangan. *Fair value* menyampaikan informasi tentang nilai kekayaan dan

kepengurusan manajemen dengan menyatakan semua aset dan kewajiban pada neraca sebagai nilai kepada pemegang saham.

PEMBAHASAN

Konvergensi IFRS

IFRS (*International Financial Reporting Standards*) merupakan sebuah standar, interpretasi & kerangka kerja dalam rangka penyusunan & penyajian laporan keuangan yang diadopsi oleh IASB. Sebelumnya IFRS ini lebih dikenal dengan nama *International Accounting Standards* (IAS). Indonesia memutuskan untuk melakukan konvergensi PSAK ke Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS. Konvergensi IFRS adalah penyesuaian pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia yang disesuaikan dengan standar internasional. Tujuan dari konvergensi ini diantaranya adalah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, memperkuat regulasi, pasar keuangan yang berintegritas, memperkuat kembali kerjasama internasional.

Tahapan adopsi yang dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan menuju konvergensi IFRS adalah (1) Tahap pertama (tahap adopsi pada tahun 2008-2010) yaitu adopsi seluruh IFRS ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan, evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap psak yang berlaku. (2) Tahap kedua (tahap persiapan akhir pada tahun 2011) yaitu penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan, penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan. (3) Tahap ketiga (implementasi tahun 2012) yaitu penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap, evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif.

Pada periode tahun 1973-1984, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah membentuk Komite Prinsip-Prinsip Akuntansi Indonesia untuk menetapkan standar akuntansi yang dikenal dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Pada tahun 1984-1994, komite PAI melakukan revisi. Akhir tahun 1994, komite standar akuntansi memulai revisi atas PAI dengan mengumumkan pernyataan-pernyataan standar akuntansi tambahan dan menerbitkan interpretasi atas standar tersebut. Pada periode tahun 1994-2004, terdapat perubahan kiblat dari pedoman US-GAAP kedalam pedoman IFRS, hal ini ditunjukkan sejak tahun 1994, telah menjadi kebijakan dari komite untuk menggunakan IAS sebagai dasar untuk membangun standar akuntansi keuangan Indonesia. Tahun 1995, IAI melakukan revisi untuk menerapkan standar-standar akuntansi yang konsisten dengan IAS. Beberapa dari standar tersebut diadopsi dari US-GAAP dan sebagian dibuat sendiri sehingga dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi akuntansi di Indonesia.

Pada periode tahun 2006-2008, merupakan konvergensi IFRS tahap pertama. Sejak tahun 1995 sampai 2012, SAK terus direvisi secara berkesinambungan. Proses revisi dilakukan sebanyak enam kali yakni pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 Juni 2006, 1 September 2007 dan versi 1 Juli 2009.

Berikut ini merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disahkan pada tahun 2007-2008 yang menghasilkan empat revisi PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disahkan pada tahun 2009 yang menghasilkan 10 revisi PSAK, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disahkan pada tahun 2010 yang menghasilkan 13 revisi PSAK.

Tabel 1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Disahkan Tahun 2007- 2008

NO	PSAK	TENTANG
1	PSAK 16 (REVISI 2007)	Asset Tetap
2	PSAK 13 (REVISI 2007)	Properti Investasi
3	PSAK 30 (REVISI 2007)	Sewa
4	PSAK 14 (REVISI 2007)	Persediaan

Sumber : Dwi Martani, Anggota Tim Implementasi IFRS (2011)

Tabel 2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Disahkan Tahun 2009

NO	PSAK	TENTANG
1	PSAK 1 (revisi 2009)	Penyajian Laporan Keuangan
2	PSAK 2 (revisi 2009)	Laporan Arus Kas
3	PSAK 4 (revisi 2009)	Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Keuangan Tersendiri
4	PSAK 5 (revisi 2009)	Segmen Operasi
5	PSAK 12 (revisi 2009)	Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama
6	PSAK 15 (revisi 2009)	Investasi Pada Entitas Asosiasi
7	PSAK 25 (revisi 2009)	Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan
8	PSAK 48 (revisi 2009)	Penurunan Nilai Asset
9	PSAK 57 (revisi 2009)	Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontinjensi
10	PSAK 58 (revisi 2009)	Asset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan

Sumber : Dwi Martani, Anggota Tim Implementasi IFRS (2011)

Tabel 3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Disahkan Tahun 2010

NO	PSAK	TENTANG
1	PSAK 19 (2010)	Asset Tidak Berwujud
2	ISAK 14 (2010)	Biaya Situs Web
3	PSAK 23 (2010)	Pendapatan
4	PSAK 7 (2010)	Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi
5	PSAK 22 (2010)	Kombinasi Bisnis
6	PSAK 10 (2010)	Transaksi Mata Uang Asing
7	ISAK 13 (2010)	Lindung Nilai Investasi Netto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri
8	PSAK 24 (2010)	Imbalan Kerja
9	ISAK 16	Perjanjian Konsesi Jasa
10	PSAK 60	Instrumen Keuangan: Pengungkapan
11	PSAK 50 (Revisi 2010)	Instrumen Keuangan: Penyajian
12	PSAK 8 (Revisi 2010)	Peristiwa Setelah Tanggal Neraca
13	PSAK 53 (Revisi 2010)	Pembayaran Berbasis Saham

Sumber : Dwi Martani, Anggota Tim Implementasi IFRS (2011)

Penggunaan Konsep *Fair Value*

Konvergensi akuntansi kedalam IFRS perlu didukung agar Indonesia mendapatkan pengakuan dari dunia internasional yang menganut standar ini. Jurang pemisah PSAK dengan IFRS telah teratasi yaitu dengan diperbolehkannya penggunaan nilai wajar (*fair value*) dalam PSAK. Sebelum penggunaan metode *fair value*, metode yang digunakan adalah metode *historical cost* atau harga perolehan sebagai dasar dalam penilaian sebuah asset perusahaan. Dalam konsep *historical cost*, pos-pos laporan keuangan diukur sebesar harga pada waktu terjadinya transaksi.

Harga ini kemudian akan menjadi dasar pelaporan besarnya suatu pos untuk periode selanjutnya, selama pos tersebut masih dilaporkan. Keuntungan dari digunakannya pendekatan *historical cost* ini adalah, besarnya pos laporan keuangan dapat dibuktikan dengan mudah karena berdasarkan transaksi yang telah terjadi. Namun, ketika terjadi penurunan atau peningkatan nilai suatu pos di pasar (bisa jadi karena inflasi atau deflasi, atau karena kelangkaan produk, dan lain sebagainya), pos yang dilaporkan tidak akan mencerminkan nilai yang berubah ini. Misalnya, menggunakan *historical cost* suatu gedung dicatat sebesar Rp100.000.000 pada tahun pertama. Pada tahun kelima, nilainya menjadi Rp50.000.000 (dengan asumsi depresiasi garis lurus untuk umur ekonomi 10 tahun). Karena peningkatan nilai strategis lingkungan, nilai gedung-gedung di lingkungan sekitar untuk perolehan di tahun yang sama, meningkat 5 kali lipat (berarti untuk gedung yang dimiliki menjadi sekitar 250 juta). Dalam hal ini, *historical cost* tidak mencerminkan nilai dari aset tetap pada saat pelaporan.

Dalam metode *historical cost* berdasarkan yaitu asumsi adanya *stable monetary unit* yang mengakibatkan semua transaksi yang terjadi dicatat atas dasar nilai historis atau nilai yang didapat saat terjadi transaksi. Di sisi lain disadari pula bahwa *stable monetary unit* tersebut pada kenyataannya tidak ada, apalagi pada negara yang menganut ekonomi terbuka seperti Indonesia. Penggunaan *historical cost* dalam akuntansi finansial disebabkan karena beberapa alasan diantaranya adalah relevan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Bagi manajer dalam membuat keputusan masa depan diperlukan data transaksi masa lalu, nilai historis yang berdasarkan data obyektif dapat dipercaya, dapat diaudit dan lebih sulit untuk memanipulasi bila dibandingkan dengan nilai yang lain seperti *current cost* ataupun

replecement cost, dan memudahkan untuk melakukan perbandingan baik antara industri maupun antar waktu untuk suatu industry.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009) nilai wajar didefinisikan dalam IFRS sebagai, “*the amount for which an asset could be exchanged between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction.*” Maksudnya adalah nilai wajar adalah suatu jumlah yang digunakan untuk mengukur aset yang dapat dipertukarkan melalui suatu transaksi yang wajar (*arm’s length transaction*) yang melibatkan pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai. Nilai wajar ini digunakan untuk mengukur satu asset, sekelompok asset, suatu liabilitas, konsiderasi bersih dari satu atau lebih aset dikurangi satu atau lebih liabilitas terkait, satu segmen atau divisi dari sebuah entitas, satu lokasi atau wilayah dari suatu entitas, satu keseluruhan entitas. Yang dimaksud dengan pengukuran, bukan merupakan pengukuran awal. Untuk pengukuran awal (saat suatu asset diakuisisi atau liabilitas muncul), entitas tetap menggunakan dasar harga pada saat terjadinya transaksi. Setelah pengukuran awal, yaitu saat pelaporan keuangan (dan untuk pelaporan seterusnya, selama aset masih dikuasai), entitas boleh memilih model harga (berdasar *historical cost*) atau model revaluasi atau *fair value* untuk mengukur pos-pos laporan keuangannya.

Dari definisinya, dapat disimpulkan bahwa nilai wajar diukur menggunakan dasar ketika aset (atau liabilitas) dapat ditukar, bukan ketika aset (liabilitas) benar-benar ditukar. Cara mengukur ketika aset atau suatu liabilitas dapat ditukar adalah menggunakan tiga pendekatan, yaitu: (1) metode pendekatan pasar, dalam pendekatan ini nilai wajar diukur berdasarkan harga pasar atau informasi relevan lain yang

dihasilkan dari transaksi di pasar. Hal ini termasuk harga aset (*liabilitas*) sejenis yang ada di pasar, dan metode penilaian lain yang konsisten dengan pendekatan pasar. Urutan yang digunakan jika nilai wajar menggunakan pendekatan pasar adalah, pertama harga pasar aset (*liabilitas*) pada saat pelaporan, jika tidak terdapat harga pasar aset (*liabilitas*) maka menggunakan harga pasar aset (*liabilitas*) sejenis, jika tidak terdapat harga pasar aset (*liabilitas*) sejenis maka menggunakan model yang konsisten dengan pendekatan pasar, contohnya adalah model *matrix pricing*. (2)metode pendekatan penghasilan, pendekatan ini menggunakan teknik penilaian untuk mengubah nilai masa depan, sebagai contohnya adalah aliran kas atau laba ke nilai kininya terdiskonto (*discounted*). Pengukuran nilai wajar dalam pendekatan ini menggunakan dasar nilai yang dilihat dari harapan pasar kini atas nilai aset (*liabilitas*) masa depan. Pendekatan ini termasuk menggunakan nilai kini (*present value, option pricing*).

Dan yang terakhir adalah menggunakan (3)metode pendekatan *cost* atau biaya, disebut juga sebagai pendekatan *cost* pengganti kini (*current replacement cost*). *Cost* pengganti ini adalah jumlah yang diperlukan untuk menggantikan suatu aset. Penggunaan *historical cost* tidak lagi relevan karena kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan telah terhambat oleh tantangan yang serius. Dan banyak orang yang berpendapat dan yakin bahwa standard akuntansi yang menggunakan *historical cost* memainkan peranan penting sebagai penyebab kerusakan perekonomian, terutama bagi lembaga simpan pinjam pada tahun 1980-an dan masalah perbankan yang terjadi pada tahun 1990-an. Karena pada waktu itu banyak laporan keuangan yang tidak mengungkapkan kerugian segera pada saat terjadi. Sehingga terdapat kesepakatan

bahwa standard akuntansi yang ada perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa laporan keuangan bermanfaat, relevan, dan terpercaya. Dan dibuatlah laporan keuangan berbasis *fair value*.

Untuk memahami implikasi dari *fair value*, harus mulai dengan pentingnya akuntansi terhadap sistem ekonomi kita. Pusat kapitalisme adalah identifikasi harga dan perhitungan laba rugi. Penilaian paling penting yang dibuat oleh manajer adalah apakah keputusan mereka menghasilkan keuntungan (laba) atau kerugian. Apalagi investor, kreditor, dan partner bisnis menggunakan data akuntansi untuk membuat keputusan untuk alokasi investasi, memperpanjang kredit, dan mengevaluasi kerja sama.

Menggunakan akuntansi *mark-to-market* akan berakibat perubahan yang terus-menerus pada laporan keuangan perusahaan ketika nilai aset mengalami kenaikan dan penurunan serta laba dan rugi yang dicatat. Hal ini membuat semakin sulit untuk memastikan apakah laba dan rugi diakibatkan oleh keputusan bisnis yang dibuat manajemen atau oleh perubahan yang terjadi di pasar. Masalah lain muncul saat akan mengubah nilai aset berdasarkan harga pasar, misalnya bagaimana menentukan harga pasar dari hutang obligasi yang dijamin. Kubu yang menentang akuntansi berdasarkan nilai pasar menggunakan argumentasi bahwa *marketvalue accounting* kurang dapat dipercaya dan menjadi halangan utama dalam penerapannya dan kukuh menganggap model *historical cost* lebih unggul sebab lebih dapat dipercayai karena tingkat reliabilitas lebih tinggi. *Subjectivity* estimasi nilai wajar aktiva (*fair value asset*) dan liabilities tanpa pasar yang likuid membuat laporan keuangan menjadi tidak dapat dipercaya.

Tetapi ada juga sebagian orang beranggapan bahwa subjektifitas selalu menjadi bagian dari akuntansi dan masalah pengukuran dalam melaporkan informasi keuangannya berdasarkan nilai pasar berhasil diterapkan perusahaan, juga ketika penggabungan usaha dengan metode pembelian. Kemungkinan terbaik estimasi konsep relevan adalah bahwa penggunaan estimasi lebih baik ketimbang menggunakan ukuran yang tidak relevan. Masalah yang selalu ada yang tidak dapat dihindari adalah bahwa model akuntansi berdasarkan *historical cost* tidak mengakui adanya perubahan nilai bersifat ekonomis, dan cenderung membiarkan perusahaan memilih sendiri apakah dan kapan mengakui adanya perubahan tersebut. Ini mendorong adanya bias dalam pemilihan apa yang dilaporkan, dan memperburuk kompromi.

Akan tetapi, hal yang cukup menarik adalah bahwa angka-angka yang dilaporkan dengan sistem akuntansi berdasarkan nilai pasar mempunyai korelasi sangat kuat dengan harga saham, dan memberi petunjuk bahwa nilai berdasarkan pasar lebih baik (lebih terpercaya) dari pada nilai berdasarkan *historical cost* seperti di AS. Akan tetapi, meskipun mempunyai keunggulan, sistem *market value accounting* berpotensi rentan terhadap manipulasi dan kesalahan estimasi, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa angka-angka nilai berdasarkan pasar dikelola untuk menghindari peraturan yang membatasi permodalan. Dapat disimpulkan bahwa, pada akhirnya, penggunaan *market value accounting* akan memberikan dukungan berharga kepada lembaga-lembaga keuangan. Kelebihan atau keuntungan menggunakan *Fair Value*, adalah (1)*Relevance*. Banyak orang percaya bahwa standard akuntansi *historical cost* telah banyak kehilangan relevansinya karena

kegagalannya mengukur realitas ekonomi. Hampir semua orang setuju bahwa peristiwa ekonomi yaitu, kejadian yang mengubah waktu kapan arus kas diterima dan jumlahnya yang akan datang harus tercermin dan terungkap dalam laporan keuangan lembaga. Akan tetapi, seringkali model *historical cost* hanya mengukur transaksi sudah selesai dan gagal mengakui adanya perubahan nilai riil lain yang dapat terjadi.

(2)*Reliability*. Masalah yang selalu ada yang tidak dapat dihindari adalah bahwa model akuntansi berdasarkan *historical cost* tidak mengakui adanya perubahan nilai bersifat ekonomis, dan cenderung membiarkan perusahaan memilih sendiri apakah dan kapan mengakui adanya perubahan tersebut. Ini mendorong adanya bias dalam pemilihan apa yang dilaporkan, dan memperburuk kompromi kenetralan dan dipercayainya informasi keuangan.

SIMPULAN

International Financial Reporting Standar (IFRS) merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan yang diterima secara global, sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman standar akuntan di Indonesia untuk membuat laporan keuangan. Indonesia sebagai sebuah negara maju yang menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi dunia telah merespon perubahan-perubahan sistem pelaporan keuangan terkini dengan melakukan konvergensi IFRS ke dalam PSAK. Dengan adanya konvergensi IFRS, maka akan memberikan pengaruh terhadap akuntansi, diantaranya dalam hal pengukuran dan penilaian persediaan. Sebelum penggunaan metode *fair value*, metode yang digunakan dalam pengukuran dan penilaian persediaan adalah metode *historical cost* atau harga perolehan sebagai dasar dalam penilaian sebuah asset perusahaan. Dalam konsep

historical cost, pos-pos laporan keuangan diukur sebesar harga pada waktu terjadinya transaksi. Harga ini kemudian akan menjadi dasar pelaporan besarnya suatu pos untuk periode selanjutnya, selama pos tersebut masih dilaporkan. Keuntungan dari digunakannya pendekatan *historical cost* ini adalah, besarnya pos laporan keuangan dapat dibuktikan dengan mudah karena berdasarkan transaksi yang telah terjadi. Sedangkan konsep *fair value*, menilai persediaan berdasarkan pada harga pasar atau pada harga saat ini. Persediaan yang dilaporkan dengan sistem akuntansi berdasarkan *fair value* mempunyai korelasi sangat kuat dengan harga saham, dan memberi petunjuk bahwa nilai berdasarkan pasar lebih baik (lebih terpercaya) dari pada nilai berdasarkan *historical cost*.

Kita harus mendukung sepenuhnya konvergensi IFRS, karena diharapkan dengan adanya konvergensi ini akan mengurangi kesenjangan dan kesalahan dalam pelaporan keuangan, selain itu dengan adanya konvergensi ini akan memberikan manfaat, diantaranya adalah peningkatan daya banding laporan keuangan dan memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional, menghilangkan hambatan arus modal internasional, mengurangi biaya pelaporan keuangan, dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju “*best practice*”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Warka Syachbrani. 2011. *Fair Value Itu Fair? Dampak Dari Penerapan Nilai Pasar Sebagai Dasar Pengukuran Aset*. http://akunsyachbrani.blogspot.com/2013/03/fair-value-itu-fair-dampak-dari_7.html. (Diakses 22 Maret 2013).
- Agustiyanti, Ayu Wulan. 2012. *IFRS dan Penerapannya*. <http://ayuwulan381.blogspot.com/>. (Diakses 4 April 2013).

- Anonim. <http://www.docstoc.com/docs/137123165/STANDAR-AKUNTANSI-dan-PERKEMBANGANNYA>. (Diakses tanggal 18 september 2013).
- Anonim.http://www.russellbedford.co.id/downloads/publications/c11b0_Naskah%20Juli%202010.pdf (Diakses tanggal 18 september 2013).
- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting Edisi 8*. BPFE. Yogyakarta.
- Bostwick, Eric. 2010. *An Analysis of The Fair Value Controversy*. Florida: Journal of Finance and Accountancy.
- Desmal, Irvan. 2011. *Konvergensi IFRS: Suatu kajian Literatur*. <http://irvandesmalcpa.wordpress.com/2011/12/07/konvergensi-ifrs-suatu-kajian-literatur/>. (Diakses 22 Maret 2013)
- Elin. 2011. *Dampak IFRS Terhadap Pelaporan Keuangan Perusahaan*. <http://blog-punyaelin.blogspot.com/2011/05/dampak-ifrs-terhadap-pelaporan-keuangan.html>. (Diakses 22 Maret 2013)
- Elnina. 2011. *Fair Value vs Historical Cost*.<http://elninaa.blogspot.com/2011/11/fair-value-vs-historical-cost.html>. (Diakses 22 Maret 2013)
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2008, *Sejarah Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009.*Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan (No 16 Paragraf 5)*. Salemba Empat: Jakarta.
- Intan, Immanuela. 2012. *Konsekuensi Adopsi Penuh IFRS Terhadap Pelaporan Keuangan Di Indonesia*. Widya Warta No. 02 Tahun XXXV I/ Juli 2012 ISSN 0854-1981. Hal 290-295
- Kieso, Donald E, Jerry J Weygandt, Terry D Warfield. 2010. *Intermediate Accounting, Thirteenth Edition, International Student Version*. New York: John Willey & Sons Inc.

- Kristianingrum, Wahyu. 2012. *Prinsip Historical Cost Dan Fair Value*. <http://Wahyukristianingrumdechriz.Blogspot.Com/2012/05/Prinsip-Historical-Cost-Vs-Fair-Value.Html>. (Diakses 22 Maret 2013)
- Magnan, Michel . 2009. *Fair Value Accounting and the Financial Crisis: Messenger or Contributor?*. <http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2009s-27.pdf>. (Diakses 28 Maret 2013)
- Martani, Dwi. 2011. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)*
- McCullough, Matthew. 2009. *The Dangers of Fair Value Accounting*. <http://www.scribd.com/doc/19594894/Fair-Value-Accounting>. (Diakses 28 Maret 2013)
- Riahi, Ahmed dan Belkaoui. 2011. *Accounting Theory. Edisi Lima Buku Satu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riahi, Ahmed dan Belkaoui. 2011. *Accounting Theory. Edisi Lima Buku Dua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sonbay, Yolinda Yanti. 2010. *Perbandingan Biaya Historis dan Nilai Wajar. Kajian Akuntansi* ISSN: 1979-48886. Vol.2, No.1. Hal 1-8
- Suwardjono. 2006. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Tiga*. Yogyakarta: BPFE
- Tyas, Esti L.A dan Nurul Fachriyah. Tahun tidak disebutkan. *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Dalam Pelaporan Aset Biologis (Studi Kasus Pada Koperasi "M")*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Warsito, Ardian. 2011. *Pengertian IFRS (International Financial Accounting Standard)*. <http://ardianjelek.blogspot.com/2011/05/pengertian-ifrs.html>. (Diakses 4 April 2013)
- Wirahardja, Roy Iman. 2010. *Adopsi IAS 41 dalam Rangkaian Konvergensi IFRS di Indonesia*. www.google.id
- Yusuf, Rizkia. 2012. *Pengertian IFRS*. <http://rizkia-yusuf.blogspot.com/2012/11/pengertian-ifrs.html>. (Diakses 4 April 2013)